

PEMERINTAHAN TIGA TUNGKU SEBAGAI STRATEGI SASISEN UNTUK PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

INTISARI

Wilayah pesisir dan laut memiliki sumber daya alam dan jasa lingkungan yang kaya terkhususnya pada sektor perikanan yang merupakan komoditas pangan tertinggi yang diperdagangkan di dunia. Akibatnya mendorong peningkatan aktivitas pesisir dan laut yang akhirnya menyebabkan penipisan sumber daya. Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi perikanan yang tinggi. Perikanan termasuk kedalam *common-pool resource* (CPRs) dan akses terbuka. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan “*tragedy of the commons*”. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan swasta gagal dalam mencegah degradasi dan tidak menghormati hak milik individu dan komunitas pengguna sumber daya. Terdapat komunitas lokal yang mampu berhasil dalam bekerja sama dan mengelola CPRs tanpa tergantung pada peraturan eksternal. Masyarakat adat Biak telah lama mengelola CPRs mereka melalui praktik *Sasisen*.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang dilakukan masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor melalui praktik *Sasisen*. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan metode *grounded theory*. Data yang digunakan yaitu data primer melalui observasi lapangan dan wawancara sedangkan data sekunder berupa dokumen peraturan kampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *snowball*.

Penelitian ini menemukan pemerintahan tiga tungku sebagai strategi *Sasisen* untuk pengelolaan sumber daya alam pesisir dan kelautan. Strategi ini terbentuk oleh tiga kategori yaitu keberlanjutan emosional dan ekologis, pengetahuan lokal dan tata kelola sumber daya setempat. Keberlanjutan emosional dan ekologis merupakan pengikat hubungan sosial antara individu masyarakat adat Biak dan juga lingkungan sumber daya itu sendiri. Pengetahuan lokal berfungsi sebagai pengetahuan terkait kondisi biofisik sumber daya dan pembelajaran yang melahirkan cara pandang yang membentuk tindakan tertentu. Kedua kategori ini mendorong tindakan kolektif masyarakat adat Biak dalam melakukan tata kelola sumber daya pesisir dan laut yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Sumber Daya Milik Bersama, Tindakan Kolektif, Masyarakat Adat, Pengelolaan Lokal, *Sasisen*, Pemerintahan Tiga Tungku

PEMERINTAHAN TIGA TUNGKU AS A SASISEN STRATEGY FOR COASTAL AND MARINE MANAGEMENT IN BIAK NUMFOR DISTRICT

ABSTRACT

Coastal and marine areas have rich natural resources and environmental services, especially in the fisheries sector, which is the highest traded food commodity in the world. As a result, it encourages increasing number of coastal and marine activity which ultimately leads to resource depletion. Biak Numfor Regency has high fisheries potential. Fisheries are included in common-pool resources (CPRs) and are open access. Excessive use of CPRs will cause a “tragedy of the commons”. Meanwhile, management carried out by the government and private companies fails to prevent degradation and does not respect the property rights of individuals and communities of resource users. There are local communities that are able to successfully collaborate and manage CPRs without depending on external regulations. The Biak indigenous people have long managed their CPRs through the practice of *Sasisen*.

This research aims to describe and explain the form of coastal and marine resource management carried out by the indigenous people of Biak Numfor Regency through the practice of *Sasisen*. This research uses a qualitative inductive approach with grounded theory methods. The data used is primary data through field observations and interviews, while secondary data is in the form of village regulatory documents. Sampling was carried out using the snowball technique.

This research finds the three furnaces government as *Sasisen*'s strategy for managing coastal and marine natural resources. This alliance is formed by three categories, namely emotional and ecological sustainability, local knowledge and local resource governance. Emotional and ecological sustainability is a bond of social relations between individuals of the Biak indigenous community with the resource environment itself. Local knowledge functions as knowledge related to the biophysical conditions of resources and learning which resulted to perspectives that shape certain actions. These two categories encourage collective action by the Biak indigenous community in implementing fair and sustainable management of coastal and marine resources.

Keywords: Coastal and Marine Resources Management, Collectively Owned Resources, Collective Action, Indigenous Communities, Local Management, *Sasisen*, Three Furnaces Government